

PENDEKATAN PENGUATAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO MODEL KUM MENUNJANG KEGIATAN PRIMA TANI DI PROVINSI JAMBI

Sugiarto¹⁾ dan Adri²⁾

¹⁾ Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Badan Litbang Pertanian, Bogor

²⁾ Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi

ABSTRAK

Permasalahan permodalan didalam pengembangan usaha pertanian, utamanya pada usaha mikro kecil pedesaan mempunyai peranan yang cukup berarti. Keterbatasan akumulasi modal dan kurang aksesnya terhadap sumber pembiayaan akan meyebabkan menurunnya produktivitas usaha dan pendapatan maupun tabungan yang akhirnya akan menghambat investasi kegiatan usaha. Didalam kegiatan Prima Tani dengan pendekatan kawasan, dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan petani yang ada didalam kawasan tersebut, maka kebutuhan modal mempunyai peranan yang sangat berarti. Berbagai skim skala mikro kecil telah banyak direalisasikan dimasyarakat untuk memenuhi kebutuhan modal usaha baik itu dalam bentuk program atau non program melalui sumber pembiayaan formal dan non formal. Namun demikian perlu upaya penguatan modal masyarakat yang telah diuji cobakan dan dianggap berhasil dalam Penguatan Keuangan Mikro Model KUM (Skim KUM) yang mengaplikasikan skim kredit pola Grameen Bank. Pendekatan penguatan modal melalui skim KUM bukan saja untuk meningkatkan pendapatan tetapi dapat diharapkan mengentaskan kemiskinan melalui akumulasi modal yang berasal dari anggota, untuk anggota dan oleh anggota yang berasaskan pada pendekatan kekeluargaan dan bisnis.

Kata Kunci : Usaha Pertanian, Prima Tani, Keuangan Mikro

PENDAHULUAN

Sebagai basis pengembangan terbentuknya pembangunan pertanian yang sebagian besar ada di pedesaan, maka diperlukan pelaksanaan berbagai program pengembangan lembaga keuangan pedesaan di sektor pertanian. Khususnya di wilayah Provinsi Jambi dalam mewujudkan revitalisasi pertanian dalam program Prima Tani, maka perlu kiranya dibangun pemberdayaan masyarakat untuk dapat akses kesumber pembiayaan yang mudah dijangkau dan mampu mandiri didalam meningkatkan skala usaha yang berwawasan agribisnis.

Sebagai salah satu pendekatan untuk memperkuat permodalan masyarakat pedesaan dan pertanian atau usaha mikro, maka dalam kegiatan Prima Tani perlu ditumbuhkan LKM model KUM (Karya Usaha Mandiri). Penumbuhan LKM model KUM adalah merupakan salah satu model/skim perkreditan dari hasil replikasi keuangan mikro model *Gramen Bank* yang mampu melayani masyarakat miskin yang kurang akses kesumber pembiayaan formal.

Untuk mewujudkan kondisi tersebut, implementasi penguatan model KUM mempunyai kinerja yang dapat diakses oleh masyarakat diantaranya adalah; (1) memberikan kenyamanan bagi peminjam, karena pelayanan dilakukan di tempat yang berdekatan dengan lokasi tempat tinggal peminjam dan sekaligus mengurangi biaya transaksi, (2) memotivasi pembayaran kembali dengan mengembalikan tepat waktu serta memberikan insentif untuk memperoleh kredit yang lebih besar, (3) memberikan

motivasi kepada peminjam untuk meminjam sebatas kemampuan serta mempertahankan kemampuan membayar, (4) menciptakan cara khusus untuk memangkas biaya administrasi karena pinjaman sangat kecil dan (5) membangun budaya menabung di lingkungan masyarakat sebagai akumulasi kegiatan usaha KUM yang tidak tergantung dari bantuan sumber dana yang lain (Syukur, 2006).

Tulisan ini bertujuan untuk memperkenalkan inovasi teknologi LKM model KUM yang dapat ditumbuh kembangkan di Provinsi Jambi dan Memberikan suatu alternatif pola penguatan Lembaga Keuangan Mikro dipedesaan melalui model KUM.

PEMBENTUKAN DAN IMPLEMENTASI KREDIT

Pembelajaran Skim Kredit Melalui Pendekatan Skim *Grameen Bank*

Grameen berasal dari bahasa Benggali yang berarti berarti desa. Dengan demikian *Grameen Bank* berarti Bank Desa. Konsep dasar pengembangan *Grameen Bank* pertama kali diciptakan pada tahun 1983 oleh Profesor Muhammad Yunus dari Universitas Chitagong Bangladesh, dengan dasar pemikiran bahwa pada dasarnya perbankan kurang berminat menjangkau golongan miskin, buta huruf, dan kaum wanita yang mempunyai resiko tinggi

Pendekatan skim *Grameen Bank* pada masyarakat miskin perlu pengawasan yang sangat ketat, karena biasanya mereka kurang disiplin finansial dan sosial, oleh karena itu dalam skim *Grameen Bank* diperlukan penegakan disiplin, seperti pelatihan anggotanya untuk meningkatkan ketrampilan individu dan sosial.

Kisah sukses pendekatan skim *Grameen Bank* sebagai salah satu contoh untuk mengentaskan kemiskinan di Bangladesh, telah menjadi acuan bagi negara diseluruh dunia. Beberapa negara yang telah melakukan replikasi skim *Grameen Bank* diantaranya adalah Bolivia, Colombia, Filipina, Guinea, India, Indonesia, Malaysia, Mali, Malawi, Nepal, Pakistan, Peru, RRC, Srilangka, Vietnam, dan beberapa negara maju seperti Perancis, Amerika dan Canada.

Pembentukan Skim KUM Melalui Replikasi *Grameen Bank*

Replikasi skim *Grameen Bank* artinya menerapkan secara utuh unsur-unsur kelembagaan *Grameen Bank* ditengah-tengah kehidupan penumbuhan LKM di Indonesia. Salah satu penerapan di Indonesia diawali melalui pelaksanaan pilot proyek yang dipercayakan pada Pusat Sosial Ekonomi Pertanian (PSE) Badan Litbang Pertanian bekerja sama dengan Pusat Pendidikan Perbankan Indonesia (PPPI) dengan membentuk pilot proyek KUM-Nanggung di Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor

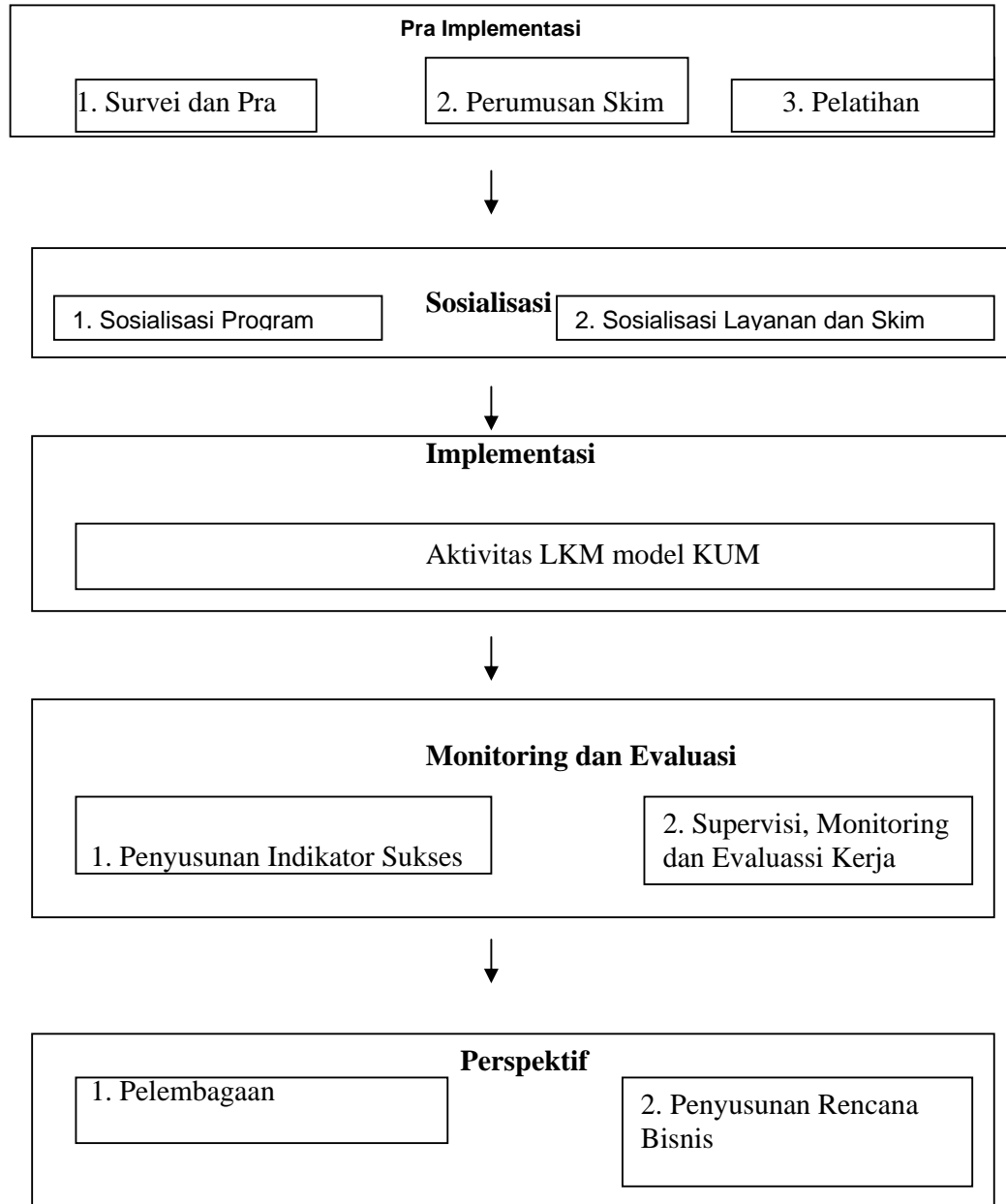
Penerapan pola *Grameen Bank* selain KUM-Nanggung, juga diimplementasikan pada kegiatan Badan Litbang Pertanian pada tahun 1999 melalui Proyek Sistem Usaha Pertanian Lahan Pasang Surut Sumatera Selatan (P2SLPS) yang disebut dengan KUM-WT. Kemudian tahun 2002, melalui kegiatan Peningkatan Produktivitas Padi Terpadu (P3T) dilakukan penerapan pendekatan pemberdayaan lembaga keuangan pedesaan model KUM yang disebut KUM-KUAT di Proyek P3T.

Pembentukan LKM Model KUM pada Kegiatan Prima Tani di Wilayah PLG

Salah satu pendekatan LKM model KUM pada kegiatan Prima Tani yang dapat diharapkan adalah mempercepat pengembangan kelembagaan keuangan di pedesaan. Hal ini berarti bahwa salah satu pendekatan pelaksanaan Prima Tani seperti pendekatan

kelembagaan yang mencakup kebutuhan modal dapat mengatasi berbagai hambatan kelangkaan sumber dana didalam melakukan kegiatan agribisnis.

Tahapan pembentukan dan implementasi LKM model KUM pada kegiatan Prima Tani di Provinsi Jambi sistematis seperti pada gambar 1.



Gambar 1. Skema pembentukan dan implementasi model KUM (Anonim, 2003)

a. Pra Implementasi

Survei dan PRA. Pada kegiatan pra implemnetasi melalui kegiatan survei dan PRA dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi tentang kondisi wilayah melalui studi calon lokasi yang akan ditentukan sebagai lokasi pembentukan KUM.

Perumusan Skim. Perumusan skim dibuat sesederhana mungkin dan mampu melayani secara cepat, mudah dan murah sehingga pengusaha skala mikro atau masyarakat pedesaan lebih cepat akses sumber pembiayaan tersebut.

b. Sosialisasi

Tahap sosialisai program dan layanan skim secara umum dilakukan di calon lokasi KUM. Dalam pertemuan dihadiri oleh pejabat dan tokoh masyarakat setempat di calon lokasi dari tingkat teritorial kecamatan, desa dan RT/RW.

c. Implementasi Skim KUM. Tahapan implementasi KUM dilakukan secara bertahap meliputi; 1) Pertemuan untuk memberikan gambaran kepada calon peserta, 2) Melakukan uji kelayakan calon peserta, 3) Membentuk kumpulan yang terdiri dari 5 anggota, 4) Melakukan latihan wajib kumpulan, 4) Membentuk rembug yang disebut ” Rembug Pusat” (minimal 2 kumpulan dan maksimum 6 kumpulan), 5) Pembentukan aktivitas mingguan dan 6) Aktivitas dan kineja pelayanan .

d. Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi. Supervisi dilakukan secara langsung dilapangan dilakukan secara reguler dan intensif..

e. Penyusunan Indikator Sukses. Disusun sebagai instrumen penilaian keberhasilan kegiatan LKM model KUM.

f. Perspektif LKM model KUM

Terbentuknya pelayanan LKM model KUM dalam perpektif masa depan harus merupakan lembaga keuangan pedesaan yang secara nyata tidak lepas dari peran pemerintah daerah. Penyusunan rencana Bisnis. Membentuk LKM model KUM yang bukan lagi sebagai pilot proyek atau kegiatan program, namun berkembang sebagai pelayanan keungan mikro yang lebih mandiri dan membiayai dirinya sendiri.

Kinerja Skim LKM Model KUM

Lingkup Kegiatan KUM

Pada dasarnya lingkup kegiatan KUM secara rinci adalah sebagai berikut:

- a). Melakukan pelayanan jasa keuangan kepada anggota
- b) Melakukan kegiatan yang lebih efisien.
- c) Mengembangkan hasil rekayasa kelembagaan jasa keuangan menjadi jasa keuangan pedesaan yang mandiri.
- d) Memobilisasi dana di pedesaan dengan menggiatkan tabungan sebagai motor pembentukan modal dari dan untuk masyarakat.
- e) Sebagai lembaga embrio keuangan mikro dipedesaan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan dana bantuan pemerintah dan keberlanjutan dalam jangka menengah dan panjang.

Fasilitasi Penumbuhan KUM

1. Pemerintah memfasilitasi dana penumbuhan KUM untuk :
 - a. Menyelenggarakan pelatihan bagi pengurus dan pengelola KUM
 - b. Menyediakan dana (*seed capital*) untuk kegiatan KUM
 - c. Pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi
2. Dana pihak swasta/mitra
3. Dana masyarakat (Akumulasi dana nasabah/peserta KUM)

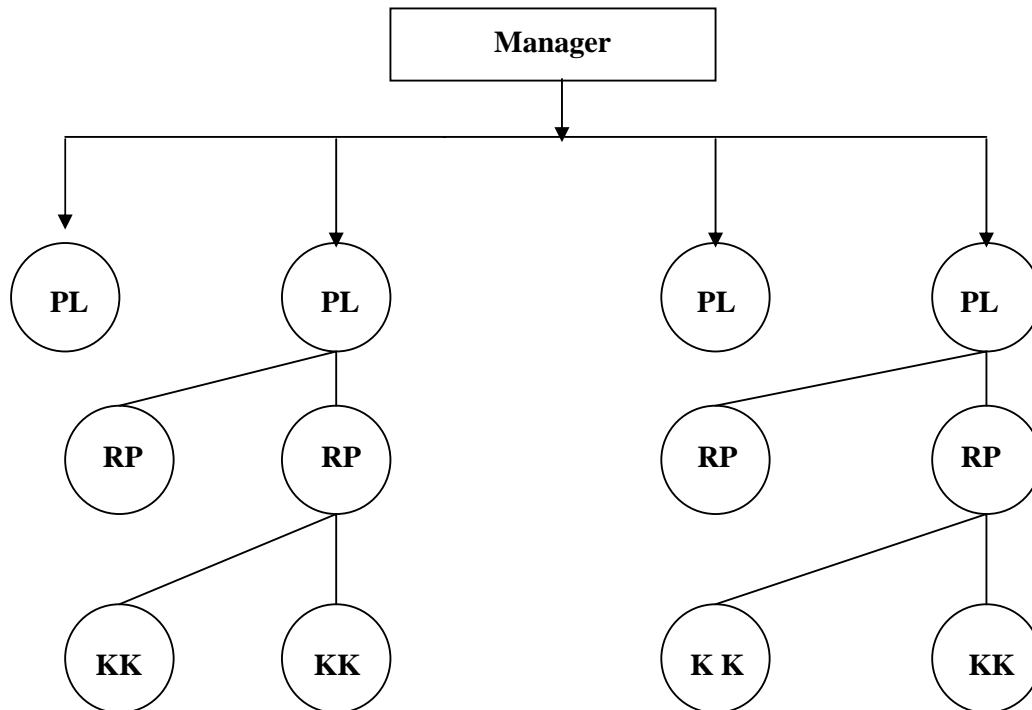
Prinsip – Prinsip Kinerja LKM Model KUM

1. Pinjaman diberikan tanpa agunan atau pinjaman tanpa tindakan hukum.
2. Prosedur pinjaman dibuat sesederhana mungkin.

3. Calon anggota membentuk Kelompok dan beberapa Kelompok membentuk satu Rembug Pusat.
4. KUM memberikan pinjaman yang jumlahnya relatif kecil dengan angsuran mingguan selama 1 (satu) tahun dan bunga sesuai dengan kesepakatan.
5. Pinjaman diberikan secara berurutan.
6. Pengawasan dilakukan selama penggunaan dana pinjaman sampai pembayaran angsuran terakhir.
7. Bagi setiap peminjam dikenakan simpanan wajib sebesar 5% dari jumlah pinjaman dan disimpan sebagai Dana Tabungan Kelompok (DTK).
8. Bagi setiap peminjam dimotivasi untuk menabung.
9. Peminjam dibebaskan dari kewajiban apabila yang bersangkutan meninggal dunia.

Struktur organisasi , Tugas dan Tanggung Jawab pada KUM

Struktur organisasi KUM dibuat sesederhana mungkin sebagai berikut, seperti pada gambar 2.



Gambar 2. Struktur sederhana organisasi KUM

Keterangan : PL = Petugas lapang, RP = Rembug Pusat, setiap rembug pusat terdiri dari 3 – 6 kelompok kecil (KK), dan setiap RP dipimpin oleh seorang ketua dan wakil ketua, KK = Kelompok kecil, terdiri dari 5 anggota, setiap KK dipimpin oleh seorang ketua dan sekretaris

Tugas dan Tanggung Jawab

Struktur organisasi yang ada dalam LKM Model KUM mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Tugas dan Tanggung jawab Manager:

1. Merencanakan kegiatan Usaha KUM
2. Mengelola kegiatan KUM.

3. Mendelegasikan wewenang dan tugas kepada staf.
4. Melakukan pelaporan kegiatan usaha KUM Kepada Pembina/ BPTP.

Tugas dan Tanggung Jawab Petugas Lapang (PL):

1. Membina dan mengelola beberapa (6–8) Rembug Pusat (RP).
2. Memeberi pelayanan/penyaluran kredit, penerimaan angsuran dan tabungan
3. Menampung aspirasi anggota KUM.

Tugas dan Tanggung Jawab Rembug Pusat (RP)

1. Memberikan dasar yang kuat bagi program pemberian kredit tanpa agunan.
2. Melakukan pengawasan dan pematauan pembayaran angsuran pinjaman..
3. Memfasilitasi dan mengusahakan kemudahan permohonan pinjaman anggota

Tugas dan Tanggung Jawab Kelompok Kecil (KK)

1. Sebagai ajang komunikasi anggota didalam mengambil keputusan.
2. Sebagai kegiatan bersama dalam tanggung renteng.
3. Untuk menyatukan kegiatan bersama dan saling tolong menolong.

Pelatihan dan Penegakan Disiplin Anggota KUM

Untuk memperlancar kinerja KUM, maka bagi anggota KUM diwajibkan:

1. Ikut ikut latihan yang disebut dengan “Latihan Wajib Kelompok (LWK) “.
2. Harus memulai menabung sesuai dengan periode latihan
3. Mengucapkan Ikrar oleh ketua RP, sebagai salah satu syarat penegakan disiplin anggota, sebagai berikut

Adalah menjadi tanggung jawab kami untuk :

- ❑ *Berusaha Menambah Rizki;*
- ❑ *Membantu anggota Kelompok dan Rembug Pusat, apabila mereka didalam kesulitan ;*
- ❑ *Menggunakan pinjaman dari KUM untuk meningkatkan pendapatan keluarga;*
- ❑ *Mendorang anak – anak untuk terus bersekolah;*
- ❑ *Dan membayar kembali pinjaman setiap minggu.*

Allah menjadi saksi yang kami ucapkan dan kami lakukan, Amin

Penegakan disiplin yang dilaksanakan oleh KUM yang diberlakukan pada anggota akan tercatat pada lembar disiplin yang diterbitkan oleh KUM yang disebut dengan “Lembar Prestasi”. Dan bagi anggota yang memenuhi kedisiplinan yang tinggi, akan dipertimbangkan oleh petugas KUM sebagai imbal jasanya. Sebaliknya bagi anggota yang kurang disiplin akan dikenakan sanksi peneguran dan penundaan pengambilan pinjaman yang berikutnya. Peneguran bagi yang kurang disiplin harus didekati secara kekeluargaan, dengan maksud tidak menurunkan kredibilitas sebagai anggota KUM.

Prosedur Pinjaman dan Bentuk Tabungan

a. Prosedur Pinjaman.

Prosedur pengajuan pinjaman bagi anggota kelompok kepada LKM model KUM diatur sebagai berikut:

1. Pengajuan pinjaman harus melalui musyawarah anggota (KK dan RP).
2. Pengajuan pinjaman mengikuti prinsip 2:2:1, yaitu siapa dua orang penerima pertama, seterusnya 2 orang kedua dan terakhir 1 orang.

3. Bagi anggota yang telah menerima, terhitung selama 1 minggu dari pencairan ditetapkan untuk tidak mengangsur cicilannya, tetapi diharuskan pada minggu ke dua dari mulai menerima uang pinjaman.
4. Permohonan pinjaman anggota kelompok, harus ditanda tangani pemohon, 4 anggota lainnya, ketua rembug dan petugas, serta disahkan oleh petugas.

b. Bentuk Tabungan

Bentuk Tabungan dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Tabungan perorangan berasal dari tabungan Sukarela.
2. Tabungan kelompok atau Dana Tabungan Kelompok (DTK) adalah tabungan milik kelompok yang dananya dihimpun dari anggota kelompok.

Pengertian Dana Tabungan Kelompok (DTK) :

1. Simpanan wajib yang dikumpulkan setiap mingguan. Besarnya simpanan wajib ditentukan dalam musyawarah, misalnya Rp 500–Rp 1000 per anggota setiap pertemuan permingguan.
2. Tabungan anggota kelompok yang dihimpun pada waktu pencairan kredit sebesar 5% dari jumlah pinjaman.
3. Biaya Administrasi dari anggota yang meminjam DTK.

Secara garis besar kegunaan DTK adalah sebagai berikut :

1. DTK merupakan bank kecil yang dimiliki kelompok.
2. DTK berfungsi sebagai asuransi kredit.
3. DTK mempunyai fungsi sosial.
4. DTK merupakan salah satu sistem pembentukan modal.
5. DTK adalah kekayaan milik kelompok yang berprinsip perkoperasian.

Indikator Keberhasilan

Keberhasilan penumbuhan lembaga keuangan mikro melalui model KUM pada kegiatan Prima Tani dapat dilihat dari berbagai indikator sebagai berikut:

1. Kemandirian lembaga keuangan dalam penyediaan biaya operasional
2. Peningkatan jumlah anggota/nasabah
3. Peningkatan mobilitas dana masyarakat/tabungan anggota
4. Peningkatan pelayanan jasa keuangan
5. Penyebaran wilayah kegiatan lembaga keuangan
6. Peningkatan penguasaan modal dan akses ke sumber pembiayaan
7. Peningkatan usaha bisnis di pedesaan
8. Perkembangan mekanisme kontrol dari bawah

KESIMPULAN

Telah banyak berbagai program didalam penguatan modal dengan tujuan untuk meningkatkan kegiatan usaha dan pendapatan yang selama ini sudah berjalan dengan berbagai skim kredit yang sangat beragam, baik itu melalui wadah koperasi, kredit usaha simpan pinjam, kredit usaha kelompok tani yang semuanya untuk memperkuat modal usaha bagi anggotanya.

Dengan beragamnya skim penguatan modal bagi masyarakat di pedesaan, maka perlu kiranya diimplementasikan skim penguatan modal dalam bentuk LKM model KUM yang telah diujicobakan di wilayah pedesaan. Keberhasilan bentuk LKM model KUM diantaranya adalah akumulasi modal masyarakat dalam bentuk tabungan sukarela, simpan pinjam, simpanan wajib yang kemudian dapat digunakan kembali sebagai usaha bagi para anggotanya untuk meningkatkan kegiatan usaha dan pendapatan.

Implementasi LKM model KUM adalah skim kredit tanpa agunan (jaminan) yang diupayakan secara individu yang dikoordinir oleh kelompok yang mampu menggerakkan aggotanya untuk memanfaatkan permodalan yang diperoleh didalam meningkatkan kegiatan usaha disektor pertanian dan non pertanian.

Implementasi LKM model KUM sangatlah sesuai diterapkan bagi golongan masyarakat ekonomi lemah yang kekurangan modal usaha dan kurang sekali memperoleh pelayanan kredit dari sumber pembiayaan formal dan non formal karena jenis usahanya kurang mampu bersaing pada berbagai segmen pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2003. Pembentukan Dan Operasionalisasi Lembaga Pembiayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (LPP-UMKM). Kerjasama Badan Koordinasi Modal Daerah Kabupaten Tangerang Dengan Lembaga Sumberdaya Informasi IPB Bogor.
- Pandu Suharto, 1996. Petunjuk Pelaksanaan Sistim Perkreditan Grameen Bank di Indonesia. Yayasan Mitra Usaha. Jakarta.
- Soentoro, Hermanto, Tri Bastuti dan Budi Raharjo, 2000. Karya Usaha Mandiri Wanita Tani. Lembaga Jasa Keuangan Pedesaan di Lahan Pasang Surut Sumatera Selatan. Badan Penelitisn dan Pengembangan Pertanian. Jakarta.
- Soentoro, Sugiarto, dan Ketut Kariyasa, 1999. Program Pembentukan Modal, Karya Usaha Mandiri Wanita Tani. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Jakarta. Bagor.
- Sugiarto, Hendiarto, Niswar Syafa'at, 2003. Panduan Teknis Pengembangan Kelembagaan Kelompok Usaha Agribisnis Terpadu. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Bogor.
- Sugiarto, Hendiarto, 2004. Analisis dan Sintesis Hasil Pelaksanaan Kelompok Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT) dalam Program P3T. Monograph Series No. 26 "Aspek Kelembagaan dan Aplikasinya Dalam Pengembangan Pertanian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Susapto, D.E, 1997. Pengembangan Kredit Mikro. Buletin Bina Swadaya. No 10. Th V, April 1997. Jakarta.
- Syukur, M, 2006. Membangun Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Pertanian yang Berkelanjutan: Sebuah Pengalaman Lapang. Warta Prima Tani. Volume 1 No 2. 2006. hal 6-7. Jakarta.
- Syukur, M. dan H. Windarti, 2001. Karya Usaha Mandiri. Sebuah Skim Pembiayaan Mikro dalam Pengembangan Ekonomi Lokal. Mimeograf.
- Yunus, M. 1981. Credit for self-employment: A Fundamental Human Right. Grameen Bank, Bangladesh.